



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

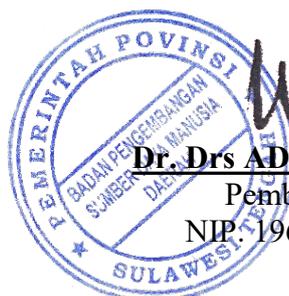
Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan baik perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal dan tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintah yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance and Clean Government*).

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Palu, Juni 2023

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Drs ADIDJOYO DAUDA., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650421 199212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	I - 1
1.2	Landasan Hukum	I - 3
1.3	Maksud dan Tujuan	I - 5
1.4	Sistematika Penyusunan	I - 6
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM 2022	II - 1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan BPSDM	II - 10
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPSDM	II - 17
2.4	Penelaahan Usulan Program Kegiatan	II - 20
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja BPSDM	III - 3
3.3	Program dan Kegiatan	III - 4
BAB IV	: PENUTUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Selain itu, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tujuan dari penyusunan perencanaan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Untuk mencapai pembangunan yang baik, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja OPD disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renja OPD adalah dokumen dengan wawasan waktu satu tahun yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsi guna mengoperasionalkan Renstra OPD untuk tahun rencana yang dimaksud dengan berpedoman pada hasil musrembang yang termuat dalam RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD. Rancangan Renja OPD dibuat sebagai bahan utama bagi musrembang daerah.

Adapun Renja OPD memiliki kedudukan dan fungsi yakni 1) sebagai acuan dalam penyusunan RKA OPD Provinsi dan RKA OPD Kabupaten/Kota



dalam upaya penganggaran serta *chek and balances*, 2) sebagai rancangan awal Renja OPD menjadi masukan bagi pemutakhiran rancangan awal RKPD menjadi Rancang RKPD yang kelak digunakan sebagai sumber bahasan dalam musrembang RKPD. Substansi Renja OPD memuat kebijakan, program serta kegiatan pembangunan.

Untuk menjamin tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah, telah ditentukan indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahun yang realistis dengan pertimbangan sumberdaya yang tersedia. Untuk itu harus ditetapkan sasaran strategis yang harus dilaksanakan. Selain itu juga dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang hendak dicapai hingga tahun 2026, yaitu sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good Governance And Clean Government) Melalui Peningkatan Kompetensi ASN	Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional
	Meningkatnya Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah

Sebagai bentuk aktualisasi dari rencana strategis tersebut perlu disusun rencana kerja tahunan sebagai penjelasan lebih rinci dari perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran. Rencana kerja tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Berkenaan dengan itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 ini telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat sasaran-sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2022 dan jumlah anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut serta indikator-indikator keberhasilan program yang nantinya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya.



1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008m tentang Perubahan Kedua atas Undang0Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI n=Nomor 4817);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah menjabarkan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026.

Adapun tujuan secara khusus dari rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tahapan pembangunan 5 (lima) tahun yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022-2026
2. Sebagai dokumen perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk jangka 1 (satu) tahun, yakni tahun 2022



3. Sebagai penegasan dari target indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2022
4. Adanya indikator keberhasilan pembangunan yang jelas dan terukur (akuntabel)
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra-OPD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**
- 3.3 Program dan Kegiatan**

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional :

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, yang selanjutnya di singkat Bidang PKMF memiliki tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepemimpinan Tingkat Menengah, Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tingkat Dasar dan Prajabatan, dan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Tahun 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tahun 2022		
	Indikator	Target	Capaian
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah	20,97%	30,21%
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rasio Keberhasilan Sertifikasi Kompetensi , Kelembagaan serta Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kompetensi Kepemimpinan Nasional Tk. II	94,2%	90,57%



Prajabatan			
	Persentase Pejabat Administrator yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan Administrator	100%	91,44%
	Persentase Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan Pengawas	67,45	73,37
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Camat Wilayah Perbatasan	30	0
	Persentase Lulusan LATSAR CPNS	100%	100%
	Jumlah pejabat fungsional yang Mengikuti Pengembangan kompetensi fungsional	60 Orang	30 Orang
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Kajian Hasil Penerapan Diklat Manajerial dan Jabatan Fungsional	1 Dok	1 Dok

Tabel 2.2

Capaian Kinerja dan Keuangan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Hingga Triwulan I Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tahun 2023		
	Indikator	Target	Capaian TW I
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah	25,34%	30,21%
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rasio Keberhasilan Sertifikasi Kompetensi, Kelembagaan serta Pengembangan Kompetensi Manajerial	100	100



	dan Fungsional		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kompetensi Kepemimpinan Nasional Tk. II	94,2%	90,57%
	Persentase Pejabat Administrator yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan Administrator	100%	91,44%
	Persentase Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan Pengawas	67,45	73,37
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Camat Wilayah Perbatasan	30	0
	Persentase Lulusan LATSAR CPNS	100%	100%
	Jumlah pejabat fungsional yang Mengikuti Pengembangan kompetensi fungsional	60 Orang	30 Orang
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Kajian Hasil Penerapan Diklat Manajerial dan Jabatan Fungsional	1 Dok	1 Dok

2. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis :

a. Diklat Teknis Inti Jabatan Administrasi

Diklat Teknis Inti Jabatan Administrasi adalah peningkatan kompetensi berkaitan dengan soft skill pemangku jabatan administrasi. Target Peserta diklat ini pada tahun 2022 adalah 240 peserta. Realisasi target adalah peserta diklat atau %.



- b. Diklat Teknis Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang
Diklat Teknis Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi berkaitan dengan urusan daerah fungsi penunjang (SETDA, SETWAN, BADAN) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Target Peserta diklat ini pada tahun 2022 adalah 55 orang peserta. Realisasi target adalah 55 peserta atau **100%**, dari target 55 orang peserta.
- c. Diklat Teknis Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi
Diklat Teknis Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi adalah Peningkatan Kompetensi Aparatur yang memiliki fokus terhadap kemampuan teknis jabatan administrasi dibidang urusan wajib dan pilihan Daerah. Target peserta diklat ini adalah 30 peserta diklat. Realisasi target adalah 126 peserta atau **100%**, dari target 30 peserta.

Tabel 2.4
Kegiatan Diklat Teknis

No.	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah (Lanjutan)	30	30
2.	Pelatihan Manajemen Talenta	55	55
3.	Pelatihan Budaya Integritas ASN	30	30
	TOTAL	115	115

3. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

- a. Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri



Indikator dari kegiatan ini adalah Cakupan layanan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri bagi ASN di Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

Target 2022 adalah 6,84% dari 292 Pejabat Administrator memiliki sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri. Realisasinya adalah % dengan capaian target %.

c. Jumlah Kerjasama Kediklatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah selalu berkerjasama dengan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan yaitu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perwakilan Kementerian/Lembaga di Sulawesi Tengah maupun Kementerian/Lembaga pengampu Diklat. Target kerjasama kediklatan pada tahun 2022 adalah 13 MoU dan realisasi target tersebut tercapai 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan telah berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, akan tetapi belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh penyelenggara diklat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami permasalahan dalam menentukan tingkat capaian kinerja pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dimana kegiatan yang diajukan setiap tahun anggaran tidak sama/berbeda sehingga sangat mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK). hal ini terjadi karena diklat yang



dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan aparatur dan masyarakat melalui analisis kebutuhan diklat (AKD) dan prioritas kediklatan.

2.3 Isu-ISu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPSDMD

Secara berjenjang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Koordinasi yang dilakukan untuk mensinergikan antara program diklat dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan antara kegiatan diklat dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, LAN RI dan BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah dan BKPSDM Kabupaten/Kota.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel akan sulit meningkat apabila BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah selaku fasilitator yang seharusnya menjadi panutan tidak mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sendiri.

Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain :

- a. Kurangnya kompetensi/kemampuan dan tanggungjawab aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
- b. Dukungan sarana terhadap penyelenggaraan kediklatan kurang memadai
- c. Sarana teknologi informasi belum terpenuhi
- d. Dukungan dana terhadap penyelenggaraan kediklatan kurang memadai

Dari permasalahan diatas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan isu-isu strategis yaitu :



- a. Sistem manajemen BPSDMD provinsi Sulawesi Tengah masih lemah sehingga mempengaruhi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- b. Lemahnya sistem manajemen penyelenggaraan kediklatan sehingga mempengaruhi perwujudan aparatur yang kompeten dan profesional
- c. Sistem informasi teknologi berbasis web pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah belum terwujud.

Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan dalam tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5

Analisis Faktor Eksternal untuk Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

No	PELUANG	TANTANGAN
1	Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi aparatur sesuai dengan bidang keahlian/job	Regulasi kepegawaian oleh Pemerintah Daerah
2	Mengembangkan pola kemitraan pada pihak ketiga dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana diklat	Akreditasi Program dapat dicabut oleh lembaga pembina bila lembaga/badan tidak dapat menunjukkan peningkatan dan perkembangan sesuai dengan yang dipersyaratkan
3	Mengembangkan pengelolaan diklat satu pintu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Komitmen dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif dalam upaya peningkatan dan pengembangan BPSDM
4	BPSDM satu-satunya lembaga penyelenggara diklat manajerial di Provinsi Sulawesi Tengah	Banyaknya Jenis Kompetensi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah berbanding dengan jumlah kompetensi tenaga pengajar (Widyaiswara) yang dimiliki BPSDM yang terbatas.



Berdasarkan analisa faktor peluang dan tantangan diatas, maka strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi Tengah yang terstandar
- b. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme dalam rangka peningkatan mutu layanan yang berstandar nasional
- c. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur internal BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah
- d. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana kediklatan
- e. Menjalin konektivitas antar OPD dalam layanan Diklat satu pintu yang bermutu.

Implikasi terhadap isu-isu strategis ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun terencana.

2.4. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Program dan Kegiatan berusaha memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yaitu ***“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”***.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan usulan pemangku kepentingan yang diperoleh berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan rapat koordinasi skala prioritas diklat antara BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan BKPSDM Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan diklat bagi aparatur ini



bertujuan untuk menciptakan aparatur yang berkarakter kuat, meningkatkan kompetensi aparatur, manajerial yang profesional, mudah mengadopsi teknologi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

Tabel 2.6 dibawah ini merupakan usulan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, yang nantinya akan sangat mempengaruhi kelembagaan diklat pada proses penilaian akreditasi program dan lembaga.



Tabel 2.6
 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022			
				Target	Rp		
1	2	4	5	7	8	9	10
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Maju, Bersinergi, Berintegritas dan Profesional Melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur Demi Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah	Percepatan Peningkatan Kualitas dan Mutu Kelembagaan		Jumlah Akreditasi Program Pengembangan Kompetensi	4			
			Grade Akreditasi Lembaga Pengembangan Kompetensi	B			
	Terwujudnya BPSDM Sebagai Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Daerah		Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	10			



			Jumlah Jenis Sertifikasi Kompetensi	2			
	Percepatan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Daerah		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20,97			
			Jumlah Program Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan	14			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	71	Rp14.560.182.717	Sekretariat BPSDM	
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai Sakip BPSDM</i>	<i>BB</i>	<i>Rp775.915.125</i>	<i>Sekretariat BPSDM</i>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	8	Rp514.595.125		Semua Kab/Kota
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1	Rp162.120.000		Semua Kab/Kota



		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1	Rp99.200.000		Semua Kab/Kota
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Keuangan BPSDMD	97%	Rp10.801.073.873	Sekretariat BPSDMD	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12	Rp10.074.614.098		Kota Palu
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas ASN	1	Rp637.725.000		Kota Palu
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	1	Rp12.644.775		Kota Palu
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	2	Rp17.500.000		Kota Palu
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	2	Rp58.590.000		Kota Palu
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Rp9.999.825	Sekretariat BPSDMD	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Rp9.999.825		Kota Palu



		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25	Rp58.820.000	Sekretariat BPSDM	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Rp58.820.000		Kota Palu
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	Rp1.292.728.904	Sekretariat BPSDM	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp21.747.376		Kota Palu
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp954.727.528		Kota Palu
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Rp39.990.000		Kota Palu
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	10%	Rp9.600.000		Kota Palu



		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	1	Rp266.664.000		Kota Palu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Rp1.073.234.990	Sekretariat BPSDM	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Jasa Surat Menyurat	12 Paket	Rp3.990.000		Kota Palu
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Rp680.521.400		Kota Palu
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Paket	Rp388.723.590		Kota Palu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Rp548.410.000	Sekretariat BPSDM	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas	100%	Rp280.800.000		Kota Palu



		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa	3	Rp89.200.000		Kota Palu
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	3	Rp178.410.000		Kota Palu
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah	21,27%	Rp10.448.736.650		
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	240	Rp890.210.050		
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	- Dokumen Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis PROVINSI Sulawesi Tengah	1	Rp3.835.425	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Kota Palu



		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-Dokumen Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Teknis Provinsi Sulawesi Tengah	1	Rp13.199.150	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Kota Palu
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	JUMLAH ALUMNI Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	60	Rp786.896.075	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Semua Kab/Kota
	JUMLAH ALUMNI Pengembangan Kompetensi Teknis Inti		30				
	JUMLAH ALUMNI Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan		150				



		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Kajian Hasil Penerapan Pengembangan Kompetensi Teknis PROVINSI Sulawesi Tengah	1	Rp86.279.400	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Semua Kab/Kota
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rasio Keberhasilan Sertifikasi Kompetensi, Kelembagaan serta Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	Rp9.558.526.600		



		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Dokumen Analisis Kebutuhan Kompetensi Manajerial, Jabatan Fungsional dan Kompetensi Pemerintahan	1	Rp104.078.250	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Kota Palu
		Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Cakupan Layanan Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri	100	Rp57.906.500	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Kota Palu
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan	57,70%	Rp364.941.500	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Kota Palu
			Persentase Pejabat Administrator yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan	20,44%			



			Persentase Pejabat Pengawas yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan	7,22%			
			Jumlah Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional	1			
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Proses Akreditasi Kelembagaan dan Program Pengembangan Kompetensi	100%	Rp1.001.177.550	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Kota Palu
			Persentase Pemenuhan Kompetensi Widyaiswara	100%			
			Persentase Pemenuhan Kompetensi Pengelola dan Pelaksana Pelatihan Aparatur	100%			
			Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Pengembangan Kompetensi	75			



			Indeks Kepuasan Peserta Pelatihan	75			
			Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Lembaga Berbasis Teknologi Informasi	100%			
		Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah MoU Kediklatan	13	Rp84.196.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Semua Kab/ Kota
			Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Pelatihan Dengan K/L/D	13			
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Dokumen Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Pemeritahan Daerah, Manajerial dan Fungsional	1	Rp45.972.700	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Kota Palu
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan pengembangan kompetensi pemerintahan daerah bagi Pimpinan Daerah dan DPRD	1	Rp7.758.729.950	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Semua Kab/Kota



			Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kompetensi Kepemimpinan Nasional Tk. II	94,20%			
			Persentase Pejabat Administrator yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan Administrator	100%			
			Persentase Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan Pengawas	64,50%			
			Jumlah aparatur yang mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	26			
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Camat Wilayah Perbatasan	30			



			Persentase Lulusan LATSAR CPNS	100			
			Jumlah pejabat fungsional yang Mengikuti Pengembangan kompetensi fungsional	60			
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Kajian Hasil Penerapan Diklat Manajerial dan Jabatan Fungsional	1	Rp141.524.150	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Semua Kab/Kota



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kredibilitas kebijakan yang tinggi dan keandalan (reliability) pedanaan akan menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan ecaa efisien dan efektif. Kementerian dan Lembaga pemerintah, dengan rasa memiliki (sense of ownership) yang tinggi terhadap kebijakan yang telah diambil karena keterlibatan mereka dalam proses formulasi, akan lebih cenderung melaksanakan anggaran sesuai rencana dan berkerja keras untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Untuk mencapai hasil yang dimaksud, sistem penganggaran harus menciptakan lingkungan yang mendukung (enabling environment), dengan karakteristik mengkaitkan perencanaan dan penganggaran dengan mengendalikan pengambilan keputusan, memberikan media/forum bagi alternatif kebijakan berkompetensi satu sama lain, meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian kembali prioritas alokasi sumber daya.

Lingkungan yang mendukung semacam ini memungkinkan sistem penganggaran untuk memfasilitasi review kebijakan dan program, sejalan dengan prioritas-prioritas yang mengalami perubahan, yang pada gilirannya mencerminkan tekanan dari berbagai sumber, yang utama berasal dari perkembangan politik, fluktuasi ketersediaan sumber daya dan informasi baru mengenai efisiensi dan efektivitas program yang didukung oleh anggaran.

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama pada pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berkenaan dengan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, salah satunya tentang pembaharuan sistem diklat aparatur, yang disebut dengan reformasi kebijakan diklat. Reformasi kebijakan diklat seperti pemberdayaan lembaga diklat di daerah, kebijakan penyelenggaraan diklat, mengelola diklat, dan



jenjang diklat. Kesemua pembaharuan ini akan sangat mempengaruhi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui program-program prioritasnya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih kekurangan staf teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu, belum optimalnya pelaksanaan diklat penjenjangan dasar maupun penjenjangan tingkat lanjutan, koordinasi antara diklat penjenjangan dasar maupun penjenjangan lanjutan belum optimal, kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan rencana kerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah

Bertolak dari penelaahan kebijakan nasional tentang reformasi kediklatan dan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kebijakan dan program prioritas untuk mencapai misinya, yaitu :

- a. Mewujudkan diklat satu pintu yang profesional dan bersinergi dengan pemangku kepentingan
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana kediklatan
- c. Mengembangkan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan
- d. Mengembangkan kompetensi Widyaiswara.

3.2.1. Tujuan dari Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuannya adalah meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3.2.2. Sasaran dari Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kualitatif, oleh karena itu sasaran harus menggambarkan hal yang ingin



dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun sasaran dari misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran berbasis informasi teknologi;
2. Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
5. Terwujudnya sistem pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
6. Terwujudnya sistem pengembangan kompetensi teknis
7. Terwujudnya organisasi yang profesional dan akuntabel berbasis kinerja, dengan pembinaan kelembagaan yang terstandar dan terakreditasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 mengacu pada pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Capaian kinerja yang akan dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran program dan kegiatan oleh BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah adalah meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional.

Adapun Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 7 (tujuh) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan terkonsentrasi di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dana



atau pagu anggaran indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 17.661.071.045	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.133.554.093	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 11.914.457.722	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 60.189.600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 373.533.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 444.590.026	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 689.560.905	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.469.156.739	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.576.028.160	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp.9.022.304.900	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp. 1.230.022.900	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp. 7.792.282.000	
	Jumlah	Rp. 26.683.375.945	

Pada tahun 2022 rencananya ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan :



b. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

- a) Kegiatan Diklat Protokoler
- b) Kegiatan Diklat Revolusi Mental
- c) Kegiatan Diklat Penilaian Asset Daerah
- d) Training Officer Course (TOC) Berbasis Elektronik
- e) Kegiatan Diklat Penanggulangan Bencana
- f) Kegiatan Diklat SIMDA Bendahara Sekolah SMA

c. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a) Diklat Kepemimpinan Tingkat III
- b) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
- c) Pelatihan Dasar CPNS
- d) Workshop Mini Bagi Tenaga Pengajar Pelatihan Dasar CPNS
- e) ToT Tenaga Pengajar Orientasi Anggota DPRD Kab/Kota
- f) Orientasi dan Pembekalan Jabatan Fungsional Widyaiswara
- g) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional P2UPD.


Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja 2022
	Kegiatan	Sasaran	Output Kegiatan	Target Waktu		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					Persentase Hasil Monitoring Evaluasi Yang di terapkan	70%
					Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan	5,33%
					Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	1,5%
					Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	2,29%



Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis					Persentase ASN yang Memiliki STTPL Kompetensi Teknis Substantif	0,75%
					Persentase ASN yang Memiliki STTPL Kompetensi Teknis Umum dan Pilihan	1,54%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Tehnis Umum, Inti dan Pilihan bagi bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, PD Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum	Pelatihan Penatausahaan Keuangan SIPD OPD Provinsi	Bendahara dan Pembantu Bendahara OPD	60 Peserta	Bulan April 2023	JUMLAH ALUMNI Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	60
	Serial Fleksibel Learning Tematik Kemandirian Fiskal Daerah	OPD Penghasil dan Pemungut PAD, Pejabat BUMD	30 Peserta	Triwulan II - III 2023		
	Sosialisasi Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengguna Barang, Pengurus Barang	90 Peserta	Triwulan III 2023	JUMLAH ALUMNI Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	120
	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	PPTK OPD Provinsi dan ASN Kab/Kota	30 Peserta	Triwulan I, II, III 2023		
	Webinar Metode Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah	ASN Provinsi Sulawesi Tengah	60 Peserta	TW IV 2023		



Sub Kegiatan Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, PD Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Tugas Tim Penjamin Mutu Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Laporan Hasil Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis	Bulan Maret - Oktober 2023	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Kajian Hasil Penerapan Pengembangan Kompetensi Teknis PROVINSI Sulawesi Tengah	1 Dokumen
	Pelaksanaan Evaluasi Pasca dan Hasil Pengembangan Kompetensi Teknis	Alumni, Mentor Alumni dan Kepala OPD	Laporan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Teknis	Bulan November 2023		
<i>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>					<i>Rasio Keberhasilan Sertifikasi Kompetensi, Kelembagaan serta Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	100%
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang	Penyusunan Analisis Kebutuhan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Bagi Jabatan Kritis		Dokumen AKD Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jabatan Kritis	Bulan Februari-April 2023	Dokumen Analisis Kebutuhan Kompetensi Manajerial, Jabatan Fungsional dan	1 Dokumen



Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Tahun 2023		Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Bulan November 2023	Kompetensi Pemerintahan	
	Penyusunan Rencana Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Tahun 2023		Dokumen Rencana Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Bulan Oktober 2023		
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provins	Pelaksanaan Layanan Lembaga Sertifikasi Pemeritahan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Tengah	ASN Provinsi Sulawesi Tengah	Layanan LSP-PDN yang Baik	Bulan Januari-November 2023	Cakupan Layanan Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri	100%
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Lv. 1	ASN Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota	120 Peserta	Bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober 2023	Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Uji Kompetensi	0,33%
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Penyusunan Dokumen Pembelajaran Digital	BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah	Dokumen Pembelajaran Digital	Bulan Agustus 2023	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan,	4 Dokumen



	Pengadministrasian Dokumen Pemenuhan Akreditasi	BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah	Dokumen Pemenuhan Penilaian Akreditasi	Januari - Desember 2023	Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	
	Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah	Dokumen Rekomendasi Tim Penjamin Mutu	Desember 2023		
	Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah Th 2024	BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah	Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi Sulteng	Bulan November 2023		
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Penyusunan dan Penandatanganan MoU	Gubernur dan Bupati/Walikota	MoU 13 Kab/Kota	Bulan Januari 2023	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen
	Penyusunan dan Penandatanganan SPK	BPSDM Provinsi dan BKPSDM Kab/Kota	SPK Pengembangan Kompetensi 13 Kab/Kota	Bulan Januari 2023		
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Penyusunan Dokumen Kurikulum Pembelajaran	BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah	Dokumen Kurikulum	TW IV 2023	Dokumen Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Pemeritahan Daerah, Manajerial dan	1 Dokumen



					Fungsional	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Bagi Pejabat Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah	Pejabat Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah	8 Orang	Bulan Maret-Oktober 2023	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	614
	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Pejabat Administrator Provinsi dan Kab/Kota	186 Orang	Bulan Februari-Oktober 2023		
	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Pejabat Pengawas Provinsi dan Kab/Kota	120 Orang	Bulan Maret-November 2023		
	Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS	CPNS Kab/Kota	180 CPNS	Bulan Februari - Juni 2023		
	Pelaksanaan Pelatihan Bagi Jabatan Fungsional Penyetaraan	Pejabat Fungsional Provinsi	120 Orang	TW III & IV 2023		



<p>Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p>	<p>Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi Pemerintahan, Manajerial dan Fungsional</p>	<p>Alumni, Mentor Alumni dan Kepala OPD</p>	<p>Laporan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Manajerial & Fungsional</p>	<p>Bulan November 2023</p>	<p>Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Kajian Hasil Penerapan Diklat Manajerial dan Jabatan Fungsional</p>	<p>1 Dokumen</p>
---	---	---	---	----------------------------	---	------------------



BAB IV

PENUTUP

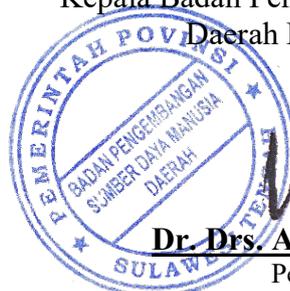
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 melaksanakan 2 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Kaidah-kaidah yang menjadi perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan oleh BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah antara lain, ketersediaan standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur dan peraturan-peraturan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan kediklatan.

Rencana tindak lanjut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur dan memenuhi standar akreditasi lembaga diklat antara lain :

1. Mengupayakan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tersedianya prosentase anggaran yang lebih proporsional yang mendukung terwujudnya re-akreditasi BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah
2. Mengikutsertakan Widyaiswara untuk meningkatkan kompetensi di bidang diklat teknis, fungsional maupun diklat lainnya
3. Mengupayakan ketersediaan anggaran uantuk menambah dan memperbaiki sarana dan prasaran penunjang kediklatan, dan
4. Melakukan perbaikan sistem managemen organisasi dan informasi sesuai dengan perkembangan saat ini.

Palu, Juni 2023

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Drs. ADIDJOYO DAUDA., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650421 199112 1 004